

JURNAL
PROMOTIF PREVENTIF

Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Booster Pasca Pandemi
di Sulawesi Utara

Analysis of Post-Pandemic Booster Vaccination Policy Implementation in North Sulawesi

Chreisy Kardinalia Fransisca Mandagi, Angela Fitriani Clementine Kalesaran,
Ricky Constantyn Sondakh

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article History

Received: 30 Agu 2025
Revised: 03 Okt 2025
Accepted: 15 Okt 2025

ABSTRACT / ABSTRAK

The COVID-19 booster vaccination program is an Indonesian government strategy aimed at strengthening community immunity in the post-pandemic period. However, the achievement of vaccination targets in several regions, including North Sulawesi Province, has not yet reached the expected level. This study aimed to assess the effectiveness of the booster vaccination policy by examining public health data and the perspectives of key stakeholders. A descriptive qualitative approach was employed, involving eight key informants consisting of health office officials, primary health center heads, program managers, and vaccine recipients. Data were collected through in-depth interviews and observations, then analyzed using the Miles and Huberman model. The results showed that booster vaccination coverage in Manado City reached only 46.2%, far below the target of 80% required to achieve herd immunity. The low coverage rate was influenced by public perceptions that COVID-19 had already been controlled and by logistical challenges in vaccine distribution. Nevertheless, most informants considered the booster dose to be essential as a specific protection to maintain immune resilience. These findings are consistent with previous studies emphasizing the importance of effective communication, equitable distribution, and sustained policy support. In conclusion, the implementation of the booster vaccination policy in North Sulawesi has been carried out but remains ineffective. Strengthening public education, ensuring equitable access to vaccines, and enhancing the monitoring system are crucial to improving program performance.

Keywords: Health policy, Booster vaccination, COVID-19, North Sulawesi

Program vaksinasi booster COVID-19 merupakan strategi pemerintah Indonesia untuk memperkuat kekebalan masyarakat pasca pandemi. Meski demikian, capaian target di berbagai daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Utara, belum optimal. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas kebijakan vaksinasi booster dengan menelaah data kesehatan masyarakat serta perspektif pemangku kepentingan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan delapan informan kunci, terdiri atas pejabat dinas kesehatan, kepala puskesmas, pemegang program, dan masyarakat penerima vaksin. Data diperoleh melalui wawancara mendalam serta observasi, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan cakupan vaksinasi booster di Kota Manado baru mencapai 46,2%, jauh di bawah target 80% untuk pembentukan herd immunity. Rendahnya capaian dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang menganggap COVID-19 sudah terkendali serta hambatan distribusi vaksin. Namun, sebagian besar informan menilai booster tetap penting sebagai proteksi spesifik untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Temuan ini konsisten dengan studi terdahulu yang menekankan pentingnya komunikasi, distribusi merata, dan dukungan kebijakan berkelanjutan. Kesimpulannya, implementasi vaksinasi booster di Sulawesi Utara berjalan, tetapi belum efektif. Peningkatan edukasi publik, pemerataan akses vaksin, serta penguatan sistem monitoring sangat dibutuhkan.

Kata kunci: Kebijakan kesehatan, Vaksinasi booster, COVID-19, Sulawesi Utara

Corresponding Author:

Name : Chreisy Kardinalia Fransisca Mandagi
Affiliate : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi, Manado Indonesia
Address : Jl. Kampus Kleak Unsrat, Manado, Sulawesi Utara, 95115
Email : chreisyemandagi@gmail.com

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai krisis kesehatan global telah menimbulkan dampak multidimensional, tidak hanya terhadap sistem pelayanan kesehatan, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai negara (WHO, 2022). Kondisi ini menuntut pemerintah untuk segera merancang dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan yang komprehensif guna memutus rantai penularan dan meminimalkan beban penyakit. Selain penanganan medis terhadap pasien COVID-19, perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagai garda terdepan juga menjadi prioritas penting dalam kebijakan kesehatan publik (Mentari, 2023).

Vaksinasi diakui sebagai intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam mengendalikan pandemi, menekan angka kesakitan dan kematian, serta membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*) di populasi (Kemenkes RI, 2021; WHO, 2022). Efektivitas vaksinasi tidak hanya ditentukan oleh efikasi biologis vaksin itu sendiri, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat (*vaccine acceptance*), distribusi yang merata, serta keberhasilan kebijakan implementasinya di lapangan (MacDonald, 2023; Mildawati et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengesahkan penggunaan sepuluh jenis vaksin COVID-19 dengan mekanisme pemberian yang bervariasi dan meluncurkan kebijakan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) sejak awal tahun 2022 untuk memperkuat imunitas masyarakat (Setditjen Farmalkes, 2022; Rahayu et al., 2022).

Meskipun kebijakan tersebut diharapkan dapat memperpanjang efektivitas proteksi terhadap infeksi SARS-CoV-2, tantangan signifikan masih dihadapi dalam pelaksanaan vaksinasi booster. Hambatan logistik, keterbatasan akses di daerah tertentu, serta munculnya keengganan masyarakat (*vaccine hesitancy*) menjadi faktor yang menurunkan capaian vaksinasi (Khairuddin et al., 2023). Di Provinsi Sulawesi Utara, misalnya, cakupan vaksinasi dosis lanjutan tercatat mencapai 128,7% dari sasaran administratif, namun angka ini belum cukup untuk menjamin terbentuknya *herd immunity* karena distribusi penerima booster tidak merata di seluruh wilayah (Fajri, 2022). Hingga Januari 2022, tercatat 34.750 kasus COVID-19 dan 1.046 kematian di provinsi tersebut, menunjukkan bahwa peningkatan cakupan vaksinasi belum sepenuhnya sejalan dengan penurunan kasus baru.

Kota Manado, dengan jumlah penduduk 476.910 jiwa, menjadi salah satu fokus utama implementasi vaksinasi booster di Sulawesi Utara. Meskipun dukungan regulasi dan logistik dari pemerintah daerah telah tersedia, capaian vaksinasi booster di Kota Manado masih belum optimal (Oktary & As'ari, 2022). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan vaksinasi sangat dipengaruhi oleh faktor penerimaan masyarakat, kepercayaan terhadap otoritas kesehatan, serta efektivitas koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaannya (Nasir et al., 2021; Lazarus et al., 2021). Namun, kajian yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan vaksinasi booster pasca pandemi di tingkat daerah masih terbatas, terutama dalam konteks sistem kesehatan daerah yang memiliki karakteristik sosial dan institusional berbeda.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan vaksinasi booster COVID-19 di Kota Manado dengan menyoroti peran Dinas Kesehatan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman empiris mengenai dinamika kebijakan vaksinasi

di tingkat lokal, serta menjadi dasar perumusan strategi peningkatan cakupan vaksinasi di masa pascapandemi.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi booster COVID-19 pascapandemi di Sulawesi Utara, Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Manado antara April dan September 2024. Lokasi ini dipilih secara sengaja karena berfungsi sebagai lembaga koordinasi utama untuk program vaksinasi regional dan mewakili manajemen vaksinasi perkotaan di provinsi tersebut.

Delapan partisipan direkrut melalui purposive sampling berdasarkan relevansi dan pengalaman mereka dalam program vaksinasi. Partisipan terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kota, koordinator program imunisasi, seorang kepala puskesmas, dan empat anggota masyarakat penerima vaksin booster. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan saturasi data, di mana tidak ada informasi baru yang muncul selama wawancara selanjutnya. Kriteria inklusi mencakup individu yang terlibat langsung dalam atau terdampak oleh kebijakan vaksinasi booster, sementara kriteria eksklusi mencakup mereka yang tidak berpartisipasi aktif dalam proses vaksinasi selama periode penelitian.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, yang didukung oleh catatan lapangan dan observasi langsung. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi Dinas Kesehatan, termasuk pedoman kebijakan, laporan vaksinasi, dan ringkasan rapat. Peneliti berperan sebagai instrumen utama (instrumen manusia), dibantu oleh panduan wawancara, daftar pemeriksaan, perekam, dan kamera untuk dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses pengkodean dilakukan secara induktif untuk mengidentifikasi tema dan kategori yang muncul dan relevan dengan tujuan penelitian. Kredibilitas data dipastikan melalui triangulasi metodologis, yaitu membandingkan temuan wawancara dengan tinjauan dokumen dan data observasi. Validasi tambahan dicapai melalui pengecekan anggota dengan informan kunci untuk memastikan keakuratan temuan yang diinterpretasikan.

Semua temuan disajikan secara naratif untuk memberikan deskripsi komprehensif tentang pola dan makna yang teridentifikasi dalam data. Persetujuan etik telah diperoleh dari dewan peninjau institusi terkait sebelum pengumpulan data, dan semua partisipan memberikan persetujuan sebelum berpartisipasi.

HASIL

Capaian Implementasi Kebijakan Vaksinasi Booster Pasca Pandemi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi booster COVID-19 di Kota Manado belum mencapai target cakupan yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni 80%. Berdasarkan keterangan informan dari Dinas Kesehatan, capaian vaksinasi booster baru mencapai sekitar 46,2%. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan minat masyarakat setelah pandemi dinilai terkendali dan persepsi risiko terhadap COVID-19 menurun. Seorang informan menyebutkan:

“Kalo booster belum, kita belum mencapai target sampai 80 persen, seingat kita Kota Manado hanya sampai di angka 40-an persen. Nah itu juga semata-mata karena menurunnya keinginan masyarakat ketika melihat bahwa penyebaran COVID-19 lebih terkendali” (J1).

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh informan lain bahwa sebagian masyarakat merasa tidak lagi memerlukan vaksinasi tambahan karena telah terbiasa dengan situasi pasca pandemi (J3).

Selain faktor persepsi risiko, aspek administratif dan kesadaran kesehatan juga memengaruhi partisipasi masyarakat. Beberapa informan masyarakat mengaku telah menerima vaksinasi booster, tetapi motivasinya lebih bersifat fungsional, seperti kebutuhan perjalanan atau kepentingan pekerjaan. Misalnya, seorang warga menyatakan:

“Sudah noh. Kalo nda ba vaksin nembole mo terbang-terbang dae pesawat” (J8).

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat melakukan vaksinasi bukan semata karena kesadaran kesehatan, tetapi lebih karena kebutuhan administratif. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan vaksinasi booster tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan dan instruksi pemerintah, tetapi juga oleh persepsi risiko, motivasi personal, dan konteks sosial masyarakat pasca pandemi. Rendahnya capaian vaksinasi menunjukkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan penerimaan masyarakat, yang menegaskan pentingnya strategi komunikasi risiko dan edukasi berkelanjutan dalam program kesehatan masyarakat setelah pandemi.

Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Kebijakan Vaksinasi Booster

Dari hasil wawancara, seluruh pemangku kepentingan, baik dari Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan puskesmas, maupun masyarakat, umumnya memiliki pandangan positif terhadap kebijakan vaksinasi booster. Mereka menganggap vaksinasi merupakan langkah preventif primer yang penting untuk menjaga imunitas dan mencegah gelombang penularan baru. Seorang informan dari Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa:

“Secara sains, untuk mencegah masalah kesehatan ada yang disebut pencegahan primer. Salah satu bentuknya adalah pemberian vaksinasi, karena ini metode efektif untuk menekan penyebaran kembali COVID-19 setelah masa pandemi” (J1).

Pemangku kebijakan di tingkat lapangan juga menekankan pentingnya percepatan cakupan vaksinasi seiring dengan mobilitas masyarakat yang tinggi di Kota Manado. Namun demikian, mereka mengakui masih adanya kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh kampanye negatif di media sosial. Seorang kepala puskesmas menuturkan, “Ada penerimaan yang cukup baik pada masyarakat berpendidikan, tapi masih ada juga yang mudah terhasut oleh kampanye negatif di medsos, sehingga tetap menolak vaksinasi” (J2).

Dari sisi tenaga kesehatan, vaksinasi booster dianggap sebagai konsekuensi ilmiah terhadap dinamika mutasi virus COVID-19. Informan menjelaskan bahwa vaksinasi dosis ketiga diperlukan karena kekebalan buatan dari vaksin tidak bersifat permanen.

“Kekebalan antibody yang terbentuk lewat vaksin menurun setelah enam bulan, jadi diperlukan booster untuk memperkuat imunitas,” (J1).

Pernyataan ini mempertegas pemahaman ilmiah bahwa pemberian booster adalah bagian dari adaptasi kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah (*evidence-based policy*).

Sementara itu, masyarakat umumnya menerima kebijakan vaksinasi booster dengan baik, meskipun sebagian besar masih memahami vaksinasi sebagai kewajiban administratif.

“Kita setuju dengan aturan baru booster, apalagi bagi PNS harus vaksin sampai tiga kali, supaya menambah imun tubuh,” (J6).

Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi lebih bersifat pragmatis dibandingkan ideologis atau berbasis kesadaran risiko kesehatan.

Perspektif para pemangku kepentingan memperlihatkan adanya konsistensi pemahaman bahwa vaksinasi booster merupakan kebijakan kesehatan yang penting dan relevan. Namun, kesenjangan antara komitmen kebijakan dan perilaku masyarakat menunjukkan perlunya penguatan dimensi sosial dari kebijakan publik, khususnya dalam membangun kembali kepercayaan dan literasi kesehatan pasca pandemi. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan vaksinasi tidak hanya bergantung pada aspek medis, tetapi juga pada strategi komunikasi, partisipasi sosial, dan dukungan lintas sektor di tingkat lokal.

PEMBAHASAN

Capaian vaksinasi booster di Kota Manado yang hanya mencapai 46,2% dari target 80% menunjukkan adanya kendala dalam pencapaian herd immunity pasca pandemi. Sejumlah informan, baik dari dinas kesehatan maupun masyarakat, menjelaskan bahwa rendahnya tingkat vaksinasi dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang merasa bahwa COVID-19 sudah terkendali, serta berkurangnya minat masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh (Irma et al., 2024) dan (Damayanti et al., 2023), Yang menyatakan bahwa keengganan untuk divaksin dapat dipengaruhi oleh persepsi bahwa pandemi sudah berakhir. Selain itu, penurunan minat ini juga dipengaruhi oleh informasi yang tidak merata dan kurangnya komunikasi publik yang efektif dari pemerintah mengenai pentingnya vaksin booster (Gunawan & Toni, 2022).

Seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, sebagian besar informan menunjukkan bahwa ketidaktercapainya target vaksinasi booster disebabkan oleh faktor psikologis dan sosial masyarakat. (Tarisa, 2023). Hal ini didukung oleh penelitian oleh (Aldisa & Maulana, 2022), yang menyebutkan bahwa komunikasi yang buruk antara pemerintah dan masyarakat menjadi hambatan utama dalam pencapaian vaksinasi. Meskipun demikian, beberapa informan juga mengakui bahwa meskipun masih ada keraguan masyarakat, sebagian besar sudah mengikuti vaksinasi booster, terutama bagi mereka yang membutuhkan vaksinasi untuk kebutuhan administratif seperti perjalanan internasional. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian lain oleh (Oktary & As'ari, 2022), yang menunjukkan bahwa kebijakan vaksinasi akan lebih efektif jika didukung dengan partisipasi aktif masyarakat dan kebijakan yang lebih inklusif serta merata.

Peran Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi booster sangat penting. Meskipun ada kesulitan dalam mencapai target yang ditetapkan, mereka tetap berusaha mendekati sasaran melalui distribusi vaksin yang lebih luas (Hardt et al., 2016). Namun, efektivitas kebijakan ini seharusnya lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan distribusi dan edukasi vaksinasi (Weintraub et al., 2021), seperti yang diungkapkan dalam buku oleh (R Hapsara Habib Rachmat, 2018), yang menunjukkan bahwa

pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk keberhasilan kebijakan kesehatan. Keberhasilan program vaksinasi booster akan bergantung pada kedekatan dan dukungan aktif antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat itu sendiri.

Sebagian besar informan mendukung kebijakan vaksinasi booster sebagai langkah pencegahan yang efektif untuk mengurangi penularan COVID-19 (Wong et al., 2023). Sebagai contoh, informan dari Dinas Kesehatan menyatakan bahwa vaksinasi adalah metode pencegahan primer yang efektif untuk menjaga masyarakat dari resiko infeksi COVID-19 pasca pandemi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa vaksinasi berfungsi untuk menurunkan angka infeksi dan memperkuat kekebalan individu serta komunitas. Penurunan kekebalan tubuh setelah enam bulan juga menjadi alasan bagi kebijakan vaksinasi dosis ketiga (Wu et al., 2022).

Meskipun banyak informan yang menyetujui vaksinasi booster, ada tantangan signifikan yang perlu diatasi. Beberapa masyarakat masih terpengaruh oleh kampanye negatif di media sosial yang meragukan keefektifan vaksinasi (Wilson & Wiysonge, 2020). Hal ini sejalan dengan temuan (Oktary & As'ari, 2022) yang menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pencapaian target vaksinasi adalah informasi yang menyesatkan yang beredar di masyarakat (Rezeki et al., 2023). Meskipun cakupan vaksinasi tinggi di beberapa wilayah, masih ada individu yang menolak vaksinasi, terutama di komunitas dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah atau mereka yang mudah dipengaruhi oleh berita palsu (Kuatewo et al., 2025). Oleh karena itu, meskipun kebijakan vaksinasi booster dianggap penting, masih ada ketidakpastian di tingkat masyarakat mengenai manfaat jangka panjangnya (Paul & Fancourt, 2022)

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan realisasi di lapangan. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Bond & Nolan, 2011) yang menyatakan bahwa meskipun vaksinasi merupakan strategi efektif, penerimaan masyarakat bergantung pada persepsi risiko dan kepercayaan terhadap kebijakan. Persepsi positif pemangku kepentingan menunjukkan dukungan struktural terhadap program (Dhaliwal et al., 2021). Namun, capaian yang rendah menunjukkan perlunya strategi komunikasi publik yang lebih intensif sebagaimana disarankan oleh WHO (2021) tentang pentingnya edukasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin (Kisa & Kisa, 2024). Selain itu, hambatan logistik seperti distribusi vaksin masih menjadi masalah klasik dalam implementasi kebijakan kesehatan di daerah kepulauan (Enayati et al., 2023). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa efektivitas kebijakan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sistem dalam mengelola sumber daya dan distribusi layanan (Mills et al., 2011)

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan vaksinasi booster pascapandemi telah diterapkan di Provinsi Sulawesi Utara, efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal karena target cakupan belum tercapai. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar pemangku kepentingan dan masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pentingnya vaksinasi booster untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Namun demikian, partisipasi masyarakat relatif rendah akibat menurunnya persepsi risiko terhadap COVID-19 serta adanya hambatan logistik dalam distribusi vaksin.

Untuk meningkatkan efektivitas program vaksinasi booster, pemerintah perlu memperkuat kampanye edukasi publik berbasis bukti guna meningkatkan literasi kesehatan

masyarakat. Selain itu, sistem distribusi vaksin harus diperluas agar lebih merata, termasuk di wilayah terpencil. Mekanisme pemantauan dan evaluasi juga perlu diperkuat guna menjamin keberlanjutan program, sementara kolaborasi lintas sektor dengan tokoh masyarakat dan organisasi lokal perlu ditingkatkan untuk memperluas jangkauan serta membangun kepercayaan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi untuk kontribusi pendanaan penelitian ini, dan juga kepada stakeholder dinas kesehatan dan masyarakat yang sudah turut berpartisipasi dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldisa, R. T., & Maulana, P. (2022). Analisis Sentimen Opini Masyarakat Terhadap Vaksinasi Booster COVID-19 Dengan Perbandingan Metode Naive Bayes, Decision Tree dan SVM. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 4(1), 106–109.
- Bond, L., & Nolan, T. (2011). Making sense of perceptions of risk of diseases and vaccinations: a qualitative study combining models of health beliefs, decision-making and risk perception. *BMC Public Health*, 11(1), 943.
- Damayanti, R. H., Rahayu, Y. S., & Alami, R. R. (2023). Gambaran Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 di Desa Lapandewa Kaindea Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Promotif Preventif*, 6(6), 829–835.
- Dhaliwal, B. K., Chandrashekhar, R., Rattani, A., Seth, R., Closser, S., Jain, A., Bloom, D. E., & Shet, A. (2021). Community perceptions of vaccination among influential stakeholders: qualitative research in rural India. *BMC Public Health*, 21(1), 2122.
- Enayati, S., Campbell, J. F., & Li, H. (2023). Vaccine distribution with drones for less developed countries: A case study in Vanuatu. *Vaccine: X*, 14, 100312.
- Fajri, N. (2022). *Pemberian Vaksinasi Booster Dosis-III (Tiga) Bagi Tenaga Kesehatan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Tahan Tubuh Terhadap Invasi Virus Covid-19 di Puskesmas Parangloe Kabupaten Gowa Tahun 2022*. Universitas Hasanuddin.
- Gunawan, R., & Toni, A. (2022). Strategi komunikasi publik Kemenkes RI dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk vaksinasi Covid-19 melalui model SOSTAC. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 52–73.
- Hardt, K., Bonanni, P., King, S., Santos, J. I., El-Hodhod, M., Zimet, G. D., & Preiss, S. (2016). Vaccine strategies: Optimising outcomes. *Vaccine*, 34(52), 6691–6699.
- Irma, I., Sabilu, Y., & Amelia, B. (2024). Persepsi Masyarakat Perdesaan Terhadap Penerimaan Vaksinasi COVID-19 Tahap III (Booster). *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, 4(2), 4.
- Kemenkes RI. (2021). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnalrespirologi.Org*, 2019(2), 1–4. <http://www.jurnalrespirologi.org/index.php/jri/article/view/101>
- Kisa, S., & Kisa, A. (2024). A comprehensive analysis of COVID-19 misinformation, public health impacts, and communication strategies: scoping review. *Journal of Medical Internet*

Research, 26, e56931.

- Kuatewo, M., Ebelin, W., Doegah, P. T., Aberese-Ako, M., Lissah, S., Kpordorlor, A. G., Kpodo, L., Djokoto, S., & Ansah, E. (2025). Fake news, misinformation, vaccine hesitancy and the role of community engagement in COVID-19 vaccine acceptance in Southern Ghana. *PloS One*, 20(6), e0316969.
- Mentari, S. A. F. B. (2023). Faktor Risiko Demam Berdarah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo*, 9(1), 22. <https://doi.org/10.29241/jmk.v9i1.1255>
- Mildawati, R., Saristiana, Y., Prasetyawan, F., & Nugroho, B. P. (2024). Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dengan Lintas Sektor. *Abdi Masyarakat Vokasi*, 1(1), 80–85.
- Mills, A., Rasheed, F., & Tollman, S. (2011). *Strengthening health systems*.
- Nasir, N. M., Joyosemito, I. S., Boerman, B., & Ismaniah, I. (2021). Kebijakan vaksinasi covid-19: pendekatan pemodelan matematika dinamis pada efektivitas dan dampak vaksin di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 4(2), 191–204.
- Oktary, M., & As'ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Dalam Tinjauan MSN Approach (Analisis System Approach Pada Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021). *Cross-Border*, 5(2), 1338–1348.
- Paul, E., & Fancourt, D. (2022). Predictors of uncertainty and unwillingness to receive the COVID-19 booster vaccine: An observational study of 22,139 fully vaccinated adults in the UK. *The Lancet Regional Health - Europe*, 14. <https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100317>
- R Hapsara Habib Rachmat, D. P. H. (2018). *Penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Indonesia*. UGM PRESS.
- Rahayu, D., Irawan, H., Santoso, P., Krisnawati, D. I., Atmojo, D. S., Susilowati, E., & Rahmawati, E. Q. (2022). Upaya Peningkatan Perlindungan Terhadap Covid-19 dengan Pelaksanaan Vaksinasi Lanjutan (Booster). *Community Reinforcement and Development Journal*, 1(2), 19–24.
- Rezeki, R., Nazhira, V., & Ramadhaniah, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Pada Masyarakat Pulo Ara Geudong Tengoh Bireuen. *Jurnal Promotif Preventif*, 6(5), 702–714.
- Setditjen Farmalkes. (2022). Dukungan Penyediaan Vaksin bagi Keberhasilan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. *Farmalkes.Kemkes.Go.Id*, 5–9. <https://farmalkes.kemkes.go.id/2022/01/dukungan-penyediaan-vaksin-bagi-keberhasilan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19/#:~:text=Vaksin COVID-19 tiba di,vaksin CoronaVac buatan dari Sinovac.>
- Tarisa, S. (2023). *Demand Masyarakat Terhadap Pelayanan Vaksinasi Booster Covid-19 di Puskesmas Maccini Sombala Kota Makassar Tahun 2023 = Public Demand for Covid-19 Booster Vaccination Services at Puskesmas Maccini Sombala Makassar City in 2023*. Universitas Hasanuddin.
- Weintraub, R. L., Subramanian, L., Karlage, A., Ahmad, I., & Rosenberg, J. (2021). COVID-19 vaccine to vaccination: why leaders must invest in delivery strategies now: analysis describe lessons learned from past pandemics and vaccine campaigns about the path to successful vaccine delivery for COVID-19. *Health Affairs*, 40(1), 33–41.

- Wilson, S. L., & Wiysonge, C. (2020). Social media and vaccine hesitancy. *BMJ Global Health*, 5(10).
- Wong, M. T. J., Dhaliwal, S. S., Balakrishnan, V., Nordin, F., Norazmi, M. N., & Tye, G. J. (2023). Effectiveness of Booster Vaccinations on the Control of COVID-19 during the Spread of Omicron Variant in Malaysia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2), 1647.
- Wu, M., Wall, E. C., Carr, E. J., Harvey, R., Townsley, H., Mears, H. V, Adams, L., Kjaer, S., Kelly, G., & Warchal, S. (2022). Three-dose vaccination elicits neutralising antibodies against omicron. *The Lancet*, 399(10326), 715–717.